



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	!
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan: 1. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam); 2. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang); 3. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN); 4. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	64 (Enam Puluh Empat)
Hari/Tanggal	:	Senin, 16 Oktober 2017
W a k t u	:	Pukul 14.55 s.d 15.45 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN), didampingi oleh: 1. Bowo Sidik Pangarso ((Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PPG), 2. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Gerindra), 3. H. Inas Nasrullah Zubir, B.E., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Hanura).
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam, BPKS Sabang, BSN, dan KPPU Tahun 2018 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Hadir	:	1. 26 dari 49 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Kepala BP Batam, Kepala BPKS Sabang, Kepala BSN, dan Ketua KPPU, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. RDP Komisi VI DPR RI dengan Kepala BP Batam, Kepala BPKS Sabang, Kepala BSN, dan Ketua KPPU dibuka pada pukul 14.55 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDP pada hari Senin, 16 Oktober 2017 dalam rangka membahas Penyesuaian RKA BP Batam, BPKS Sabang, BSN, dan KPPU Tahun 2018 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Kepala BP Batam, Kepala BPKS Sabang, Kepala BSN dan Ketua KPPU untuk menjelaskan mengenai Penyesuaian RKA BP Batam, BPKS Sabang, BSN, dan KPPU Tahun 2018 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Kepala BP Batam, Kepala BPKS Sabang, Kepala BSN, dan Ketua KPPU.

II. KESIMPULAN

A. BP BATAM

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sebesar **Rp2.046.159.533.000,00** (*Dua Triliun Empat Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Adapun rincian alokasi anggaran per program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam Rp 902.401.367.000,00
2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Rp 1.143.758.166.000,00

Selanjutnya ketetapan Komisi VI DPR RI akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk bahan akhir penetapan RUU APBN Tahun Anggaran 2018.

B. BPKS SABANG

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sebesar **Rp224.864.020.000,00** (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah*). Adapun rincian alokasi anggaran per program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKS Rp 45.003.758.000,00
2. Program Perencanaan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang, termasuk dana BLU Rp7.700.000.000,00 Rp 179.860.262.000,00

Selanjutnya ketetapan Komisi VI DPR RI akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk bahan akhir penetapan RUU APBN Tahun Anggaran 2018.

C. BSN

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sebesar **Rp182.465.697.000,00** (*Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Adapun rincian alokasi anggaran per program sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN | Rp 79.438.290.000,00 |
| 2. Program Pengembangan Standardisasi Nasional | Rp 103.027.407.000,00 |

Selanjutnya ketetapan Komisi VI DPR RI akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk bahan akhir penetapan RUU APBN Tahun Anggaran 2018.

D. KPPU

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp134.795.052.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Adapun rincian kegiatan dalam alokasi program Pengawasan Persaingan Usaha sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi Persaingan Usaha | Rp 13.597.700.000,00 |
| 2. Investigasi Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat | Rp 8.830.400.000,00 |
| 3. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha | Rp 5.475.000.000,00 |
| 4. Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha | Rp 17.400.000.000,00 |
| 5. Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja KPD KPPU | Rp 9.632.500.000,00 |
| 6. Penilaian Merger dan Akuisisi | Rp 5.200.000.000,00 |
| 7. Pengawasan Kemitraan | Rp 2.500.000.000,00 |
| 8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Rp 13.237.268.975,00 |
| 9. Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga | Rp 9.602.163.095,00 |
| 10. Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU | Rp 1.410.323.298,00 |
| 11. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran | Rp 2.619.296.632,00 |

Selanjutnya ketetapan Komisi VI DPR RI akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk bahan akhir penetapan RUU APBN Tahun Anggaran 2018.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.45 WIB.